

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mungkin tidak ada permasalahan aspek kehidupan yang lebih banyak memperoleh perhatian dari kalangan masyarakat luas daripada pendidikan, khususnya yang diselenggarakan melalui sistem persekolahan (Soedijarto, 1999: 14). Perhatian tersebut terutama lebih terfokus pada masalah mutu pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia, baik kemampuan, kepribadian, maupun rasa tanggungjawabnya.

Upaya peningkatan mutu pendidikan secara terus-menerus dilakukan baik secara konvensional maupun secara inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan Depdiknas (2001:1), bahwa: "berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup

menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan." Lebih lanjut dikemukakan bahwa dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami perubahan secara merata. Faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut (Depdiknas, 2001: 1-2).

*Pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka *mutu pendidikan (output)* secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

*Kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

*Ketiga*, peranserta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).

Memahami hal tersebut, tentu saja diperlukan berbagai upaya perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan melalui penataan

perangkat lunak (*soft ware*) dan perangkat keras (*hard ware*). Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional juga telah mencanangkan "Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan" pada tanggal 2 Mei 2002; dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas (2003) bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk ... mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang bertakwa kepada Allah SWT, berahlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan profesional pada bidangnya masing-masing. Hal tersebut penting, terutama untuk mengantisipasi era kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan negara-negara ASEAN.

Apa yang diuraikan di atas, telah dituangkan pula dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 pada Bab III B bagian 10; bahwa misi negara adalah mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Arah kebijakannya antara lain mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai suatu sistem, Pendidikan Nasional haruslah dikelola dengan tepat agar dapat melaksanakan fungsi, misi dan kebijakan tersebut.

Berkenaan dengan pengelolaan Pendidikan Nasional, Tilaar (1994: 11) mengemukakan bahwa manajemen sistem pendidikan nasional merupakan suatu proses sosial yang direkayasa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien dengan mengikutsertakan, kerjasama serta partisipasi seluruh masyarakat. Proses sosial tersebut perlu dipetakan dan dirancang melalui perencanaan yang matang dan menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Anderson dan Windham (1997: 63), mengungkapkan bahwa dalam rangka merancang suatu lingkungan pendidikan secara keseluruhan harus dimulai dengan suatu analisis menyeluruh terhadap kondisi-kondisi pendidikan sekarang. Dalam hal ini, sedikitnya ada dua hal yang berkaitan: (1) suatu survey yang teliti terhadap wilayah pendidikan untuk melukiskan rancangan secara potensial; (2) suatu klasifikasi pendidikan berdasarkan kategori sistem. Studi yang sistematis terhadap lingkungan pendidikan dapat dilakukan melalui tiga fase: pertama, menguji berbagai pandangan tentang lingkungan pendidikan; kedua, lingkungan pendidikan dapat diinvestigasi secara mendalam; dan ketiga, perancang pendidikan dapat mempelajari berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antara elemen-elemen pendidikan yang bervariasi.

Anderson dan Windham (1997: 66) juga mengungkapkan beberapa kecenderungan pendidikan yang direfleksikan dalam dimensi-dimensi sebagai berikut: (1) peningkatan skala; (2) perencanaan pendidikan secara menyeluruh (komprehensif); (3) alternatif-alternatif yang layak; (4) rancangan pendidikan perkotaan; (5) rekayasa sistem pendidikan; dan (6) proses pembuatan keputusan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pendidikan tidak sekedar proses yang berkaitan dengan pengetahuan, tetapi lebih dari itu pendidikan juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan masalah fisik, emosional, dan aspek-aspek finansial. Sehubungan itu, pendidikan harus merefleksikan berbagai program nyata dan melayani kebutuhan pengguna jasa pendidikan. Pendidikan yang baik harus berkaitan dengan kehidupan itu sendiri, yang mengimplikasikan pengetahuan secara biologis, sosial, psikologis, dan masalah ekonomi.

Dalam pada itu, pendidikan harus dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi di masyarakat global, seperti beberapa hal yang diungkapkan Sanusi (2007), yang mencakup *social change, turbulence, complexity, dan chaos*, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya teknologi informasi yang berlangsung begitu pesat. Lebih lanjut



Sanusi mengungkapkan bahwa untuk menghadapi kondisi seperti diungkapkan di atas, setiap orang perlu memiliki *"the sccond curve, agar dapat berselancar dalam chaos*, termasuk dalam bidang pendidikan.

Pendidikan juga harus mampu mengembangkan lingkungan dan memahami berbagai hal yang berhubungan dengan komponen-komponen sistem lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap individu yang memiliki berbagai implikasi terhadap pendidikan dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus memiliki pandangan secara psikologis tentang berbagai aspek dan faktor yang mempengaruhi peserta didik serta mempertimbangkannya dalam mengembangkan berbagai lingkungan pendidikan. Demikian halnya dalam peningkatan mutu pendidikan di lingkungan IPDN, harus memperhatikan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap praja, di samping aspek-aspek lainnya. Hal ini penting, karena IPDN memiliki posisi sentral yang sangat strategis dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa.

Menyadari hal tersebut, pendidikan di IPDN harus dihindarkan dari berbagai penyakit birokrasi, antara lain power orientasi, sentralisasi, uniform, tidak produktif, dan over birokrasi. Perubahan yang harus dilakukan antara lain berkaitan dengan

masalah moral, etika, etos kerja, semangat religius, ilmu, fisik, dan perilaku, yang dapat menghasilkan "*driving force*" untuk melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri dan lingkungannya.

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, yang menunjukkan bahwa masalah mutu pendidikan, termasuk mutu pendidikan IPDN yang sangat kompleks, dan dengan mengingat hasil pengamatan sementara tentang kondisi pendidikan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dirasakan perlunya suatu tindakan melalui kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Manajemen Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Studi Kasus di IPDN Jawa Barat)."

## **B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian**

Masalah yang akan dikaji dan dicarikan jalan keluarnya dalam penelitian ini adalah manajemen strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat.

Masalah tersebut berkaitan dengan upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang tercermin dalam prestasi belajar praja, dengan mengkaji berbagai faktor yang

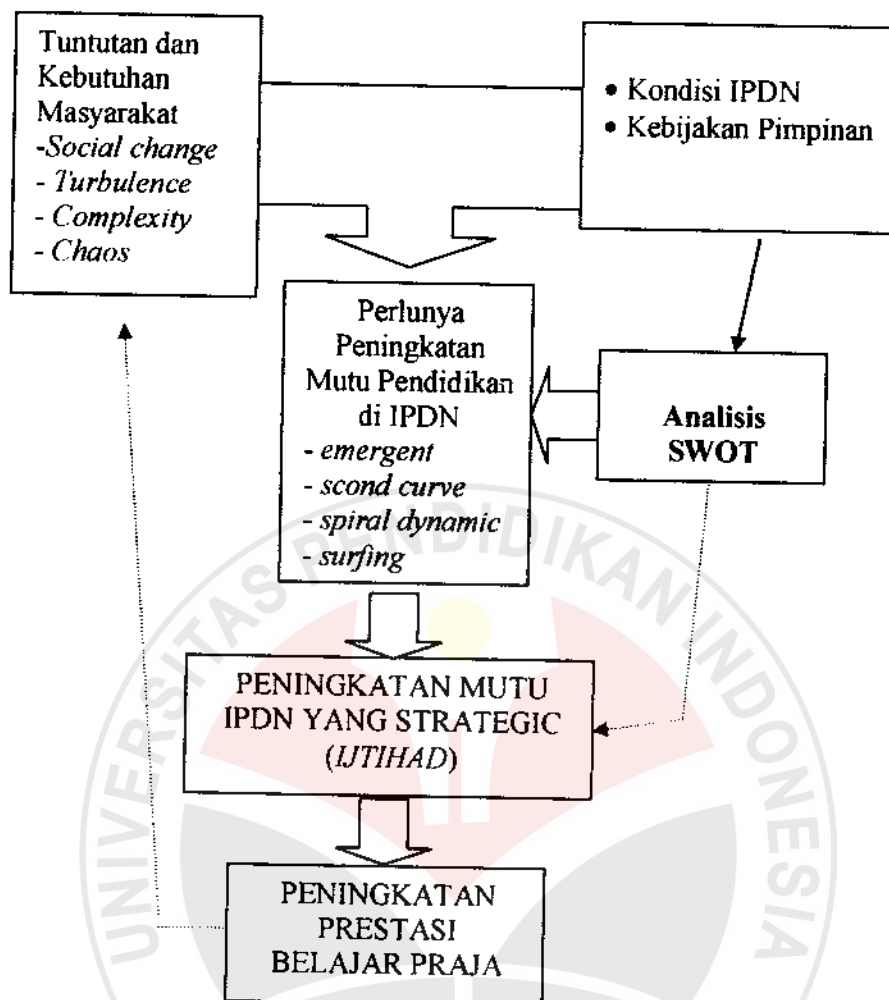


mempengaruhinya. Hal ini terutama dimaksudkan agar IPDN dapat mengembangkan dan meningkatkan berbagai potensinya secara optimal, baik potensi praja, potensi tenaga kependidikan, maupun potensi masyarakat yang dapat digali di sekitar kampus. Strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tercermin dalam prestasi belajar praja, perlu berangkat dari pemahaman tentang kondisi pendidikan yang ada (*Facts*), kebijakan-kebijakan yang berlaku (*Policy*), strategi peningkatan mutu (*Theory*), dan apa yang diharapkan dari lembaga tersebut/IPDN (*Filsafat*). Dalam hal ini, diperlukan pula informasi dan data tentang posisi lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan pengembangan strategi (*SWOT*). Pemahaman terhadap berbagai permasalahan di atas, berserta hasil analisis SWOT, selanjutnya ditawarkan konsep manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan IPDN.

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, fokus penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat; strategi Departemen Dalam Negeri dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN; materi, metode, evaluasi, dan tindak lanjut pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN; faktor-faktor yang menjadi pendukung (kekuatan dan peluang), serta penghambat (kelemahan dan

tantangan); peran dan kinerja Badan Diklat Depdagri dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN, yang semuanya terarah pada terumuskannya konsep dan model manajemen strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan IPDN. Fokus penelitian ini selanjutnya dapat dilihat dalam gambar 1.1. halaman berikut.

Karena permasalahan penelitian sebagaimana diuraikan di atas menyangkut berbagai aspek yang sangat erat kaitannya, maka untuk memperjelas masalah yang akan dijadikan topik penelitian ini perlu ditetapkan fokus penelitian secara tegas dan jelas. Fokus penelitian ini lebih diorientasikan pada manajemen strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan IPDN, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Penetapan fokus penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan lebih bermakna, dalam rangka menemukan suatu konsep dan prinsip yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tersebut tercermin dalam prestasi belajar praja.



Gambar 1.1 Fokus Penelitian

### C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini, dikemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut.

1. Strategi (*strategy*) merujuk pada adanya keterkaitan antara *internal strengths* dengan *external needs*. Dalam hal ini, strategi mengandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, pertimbangan ekonomis dan finansial, serta analisis terhadap rencana tindakan yang lebih rinci. Suatu strategi harus ditangani dengan baik, sebab "... *it is not only knowing the competitive environment, allocating resources, restructuring organizations, and implementing plans, but it also involves controlling the management process*" (Rowe, dkk, 1990: vii). Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu siasat jangka panjang yang merujuk pada keterkaitan antara *internal strengths* dengan *external needs* untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya prestasi belajar praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara menyeluruh.
2. *Mutu Pendidikan*. Secara umum mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan (Depdiknas, 2001). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah proses efektif yang dilalui dan hasil belajar yang dapat dicapai oleh para praja, yang tertera dalam kartu hasil studi (KHS). Dengan

demikian yang dimaksud dengan peningkatan mutu pendidikan dalam penelitian ini adalah peningkatan proses dan hasil belajar praja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat.

Berdasarkan konsep-konsep yang digunakan di atas, maka judul penelitian tentang: “Manajemen strategi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Studi Kasus di IPDN Jawa Barat)”, merupakan salah satu kajian manajemen pendidikan, karena peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Secara umum pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini adalah sebagai berikut: “Manajemen strategi apa saja yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat?”

Pertanyaan penelitian umum tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian khusus sebagai berikut.

1. Manajemen strategi apa yang digunakan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dalam pengembangan dan peningkatan

- mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat untuk meningkatkan prestasi belajar praja?
2. Bagaimanakah peran dan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Depdagri dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN?
  3. Apa strategi operasional (materi, metode, evaluasi, dan tindak lanjut) pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN Jawa Barat?
  4. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung (kekuatan dan peluang), dan penghambat (kelemahan dan tantangan) dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN Jawa Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Memahami masalah penelitian sebagaimana dirumuskan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi empirik tentang manajemen strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat.

Berdasarkan tujuan umum tersebut selanjutnya dijabarkan beberapa tujuan penelitian khusus, yakni untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.



1. Manajemen strategi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat untuk meningkatkan prestasi belajar praja.
2. Peran dan kinerja Badan Diklat Depdagri dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat.
3. Strategi operasional (materi, metode, evaluasi, dan tindak lanjut) pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat.
4. Faktor pendukung (kekuatan dan peluang), serta penghambat (kelemahan dan tantangan) dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN Jawa Barat.

## **F. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam

manajemen strategi, serta menjadi masukan berupa sumbangan terhadap pengembangan nilai-nilai dasar (*basic value*) pendidikan, yaitu upaya menemukan dalil-dalil dan prinsip-prinsip perencanaan strategi (*strategy planning*), dan manajemen strategi (*strategy management*) untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini penting terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dan pemerintahan yang *clean governance* dan *good governance*, serta memenuhi tuntutan reformasi dan memasuki era globalisasi, sebagai era persaingan mutu atau kualitas yang kompleks, penuh tantangan dan kesemrawutan (*chaos*).

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Lebih lanjut hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka:

- a. Mengatasi masalah pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan melalui perencanaan strategi (*strategy planning*).
- b. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)

memasuki era globalisasi dan pasar bebas, khususnya di negara-negara ASEAN.

- c. Mengatasi hambatan dan tantangan, serta memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen strategi (*strategy management*).

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran tentang “Manajemen Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat”, ini dapat dilukiskan dalam gambar 1.2 pada halaman berikut.

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Sisdiknas 2003, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN 1999) yang merupakan rencana strategi nasional (Renstranas), dan perencanaan strategi pengembangan IPDN, terutama berkaitan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres Nomor 87 Tahun 2004), tanggal 6 oktober 2004, tentang penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di Jawa Barat dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta, menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran

Penggabungan STPDN dengan IIP tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sesuai dengan visi dan misi IPDN yang saat ini masih dalam masa transisi. Peningkatan mutu pendidikan tersebut diperlukan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi. Hal tersebut dilakukan terutama agar IPDN sebagai Lemdika dalam lingkungan Depdagri dapat membentuk, mencetak, membina dan mendidik kader pemimpin pemerintahan dalam negeri yang demokratis dan *ready for use* dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yaitu pemerintahan umum dan urusan umum pemerintahan baik di pusat maupun di daerah secara berdayaguna dan berhasil guna.

Proses peningkatan mutu pendidikan tersebut diperlukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan alumni IPDN yang dapat menjadi kader pemimpin pemerintahan dalam negeri, sekaligus menjadi pengayom dan teladan bagi masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan IPDN juga diperlukan sesuai dengan perkembangan IPTEK dalam era globalisasi, sehingga para alumni IPDN, dalam melaksanakan tugasnya dapat tetap mengamalkan dan menjaga nilai-nilai nasional serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat.

Achmad Sanusi (dalam Alma, 2005: 125) melihat mutu pendidikan dari tiga dimensi yaitu: mutu hasil belajar, mutu mengajar, dan mutu bahan kajian dan pelajaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai mutu hasil belajar kita harus dapat menemukan dimensi, kriteria dan ukuran hasil belajar itu yang

paling sah yaitu yang paling rasional dan *reasonable*. Tidak salah kiranya kalau dikatakan belajar dan hasil belajar itu akhirnya merupakan ujung tombak mutu pendidikan. Dimensi kedua dari mutu pendidikan ialah dimensi mutu mengajar yang memenuhi kriteria sebagai mengajar yang bermutu. Selain pengetahuan dan kompetensi dasar pedagogisnya, sekurang-kurangnya persepsi dan sikapnya terhadap sejumlah faktor yang lain di luar dirinya turut memberi saham terhadap pola dan mutu mengajarnya. Dimensi ketiga adalah mutu bahan kajian dan pelajaran. Bahan kajian ini bukan saja pengajar dan siswa akan dibuat bermutu, melainkan juga pada dirinya merupakan rangkaian mutiara, yang mengandung daya dan kekuatan yang dapat menggugah bahkan membangkitkan keseluruhan potensi pikiran, perasaan, kemauan, dan kepercayaan secara optimal.

Proses peningkatan mutu pendidikan IPDN tersebut menuntut suatu strategi yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu dilakukan pengkajian untuk menemukan manajemen strategi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan (studi kasus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jawa Barat)". Manajemen strategi ini akan mengkaji berbagai input, khususnya calon mahasiswa, proses perkuliahan, dan kualitas lulusan.



## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Manajemen Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan IPDN Jawa Barat ini akan dikembangkan dalam enam bab, mulai dari pendahuluan, kajian konseptual, metodologi penelitian, hasil penelitian, pokok-pokok dan pembahasan hasil penelitian, sampai pada suatu kesimpulan. Adapun sistematika yang akan digunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan; Bagian pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan fokus penelitian, tujuan penelitian, paradigma penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan.

Bab II. Kajian teoritis; membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan mutu pendidikan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, manajemen peningkatan mutu, perencanaan strategi (*strategy planning*), management strategy (*strategy management*) untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Bab III. Metodologi penelitian; menguraikan secara rinci mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, tahapan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, proses pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data.

Bab IV. Hasil penelitian; bab ini berisikan hasil-hasil penelitian dan analisis deskriptif terhadap seluruh data yang berkaitan dengan Manajemen Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Bab V. Pokok-pokok dan pembahasan hasil penelitian; berisikan tentang pokok-pokok hasil penelitian, penafsiran dan pembahasan terhadap hasil penelitian, serta pengembangan konsep management strategy (*strategy management*) untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Bab VI. Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi; menguraikan tentang pemaknaan terhadap seluruh hasil penelitian (*Research*), implikasi dari hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, baik lembaga maupun perorangan, dan yang berkepentingan dengan management strategi (*strategy management*) untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat.